

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

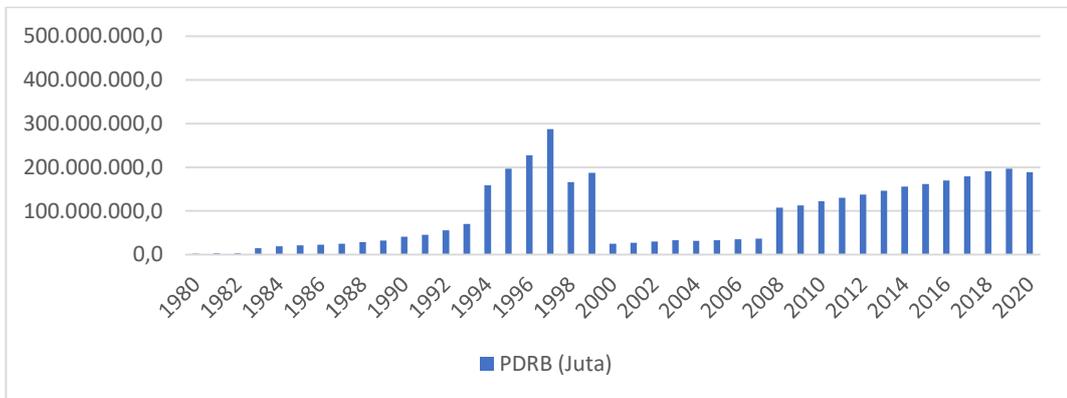
Perkembangan didalam pembentukan ekonomi yang baik di suatu negara tentunya membawa perubahan pada struktur ekonomi negara itu. Pada struktur Ekonomi Tradisional mengacu dalam sektor pertanian, namun struktur Ekonomi Modern mengacu pada sektor industri yang merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktural penggerak perekonomian memperlihatkan pada, seiring dalam meningkatnya pendapatan perkapita, tingkat ekonomi pada sebuah negara menjadi beralih dari bidang pertanian tradisional beralih ke bidang industri. Transformasi struktural juga melihat pada perubahan nilai tambah setiap sektor industri didalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Putri, 2016).

Pengembangan di kawasan industri di Kabupaten Bekasi memiliki wilayah yang sangat konstan strategis sehingga dapat digali potensi perkembangannya. Pembangunan industri daerah harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, serta tidak mengabaikan prioritas khusus daerah. Dalam beberapa hal, keanekaragaman Sumber Daya Alam (SDA) menjadi kendala, namun disisi lain dapat mendorong pengembangan industri daerah. Keseriusan dan ketelitian tim perencana dalam pelaksana pembangunan industri Kabupaten Bekasi untuk menggali potensi serta membenahi kekurangan tersebut menjadi suatu kunci kesuksesan pembangunan industri di Kabupaten Bekasi (Hidayat, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan seperti hasil pertambahan nilai melalui wujud dari semua sektor bisnis di wilayah tertentu atau nilai semua produk dan jasa akhir yang dilihat dari keseluruhan penerimaan menurut lapangan usaha pada PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi memegang kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian (BPS Kabupaten Bekasi, 2021). Berikut penjelasan grafik di bawah untuk

menggambarkan PDRB pada sektor industri pengolahan menurut lapangan usaha tahun 1980-2020 di Kabupaten Bekasi.

Gambar 1. Grafik PDRB Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi Tahun 1980-2020 (Juta Rupiah).



Sumber : BPS Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020

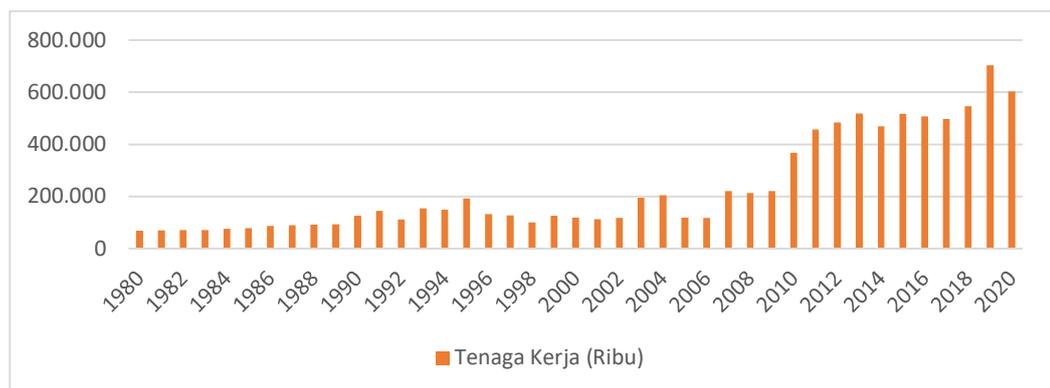
Bersumber pada gambar 1 (satu) di atas dapat dilihat dari 30 tahun terakhir mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi yang sedang berada dalam fluktuatif. Hasil kenaikan yang paling signifikan tinggi terdapat pada tahun 1997 dimana pada saat itu nilai PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi sebesar 287.997.247,3 rupiah. Pada tahun tersebut, Proyek Administrasi Pertanahan Indonesia (PAP) mempercepat hak kepemilikan tanah melalui registrasi yang di fokuskan dalam skala besar di Jawa Barat, sehingga sebagian besar terjadi peralihan tanah pertanian menjadi tanah industri (SMERU, 2002). Sementara pada tahun 2000 nilai PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi sebesar 25.075.982,93 rupiah dan termasuk paling rendah. Selain baru dimulainya perhitungan Atas Dasar Harga Kontan tahun 2000, kondisi ini juga disebabkan perkembangan dan perluasan kawasan lahan industri di Kabupaten Bekasi terhalang oleh bertambahnya kawasan permukiman (Alfarizi et al., 2015). Melihat tahun 1998 PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi masih bertahan dari krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia, namun bidang industri pengolahan di Kabupaten Bekasi tetap menjadi bidang yang memimpin dari bidang lainnya. Hal ini disebabkan dilegalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 13 Tahun 1998 yang menentukan Kabupaten Bekasi sebagai Zona Industri (Setyowati et al., 2015). Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga

memfokuskan pada sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja yang besar dan investasi.

Perkembangan ekonomi tentu seiring direspon oleh tenaga kerja, karena tenaga kerja termasuk alat untuk memajukan pembangunan ekonomi. Salah satu ambisi pada pembangunan adalah bagian tenaga kerja dalam perekonomian secara cepat mempengaruhi tingkat pengembangan perekonomian daerah (Adil, 2017).

Secara umum, pertumbuhan sektor usaha bidang produksi pada suatu daerah tentu akan mengembangkan besaran tenaga kerja. Banyaknya unit bisnis berpengaruh baik pada jumlah tenaga kerja yang dimana terjadi peningkatan kuantitas unit bisnis maka total pekerja hendak diperlukan akan bertambah pula (Muhtamil, 2017). Hal ini diperkuat dalam grafik berikut untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja Kabupaten Bekasi selama 40 tahun terakhir.

Gambar 2. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Tahun 1980-2020 (Ribuan).



Sumber : BPS Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020

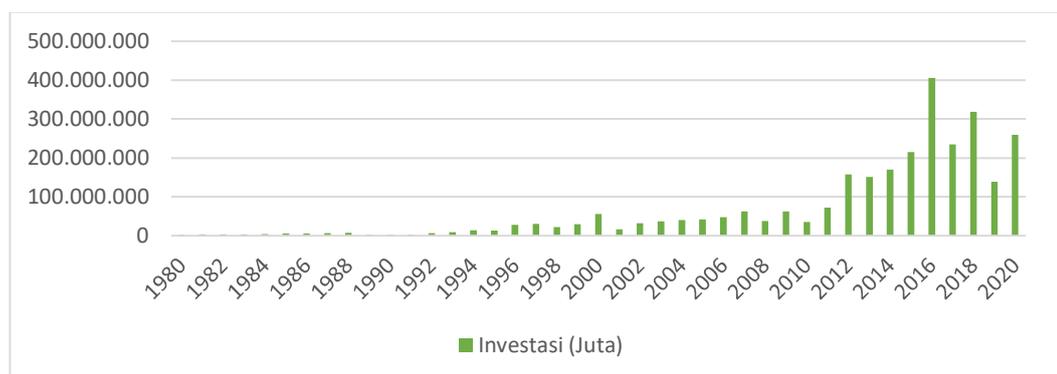
Berdasarkan gambar 2 (dua) di atas dapat dilihat dari 30 tahun terakhir mengenai grafik jumlah tenaga kerja saat dipekerjakan di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi terus terdapat fluktuatif. Pertambahan kuantitas tenaga kerja terlihat signifikan tinggi di tahun 2019 sebanyak 704.154 orang, hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib mempekerjakan tenaga regional lokal sebanyak-banyaknya (Suci, 2019). Jumlah tenaga kerja paling sedikit terlihat di tahun 1989 sebanyak 92.642 orang, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah baru memberlakukan Proyek Pendayagunaan Tenaga Kerja

Penganggur dan Setengah Penganggur (PTKPSP) di 11 provinsi dalam proyek sistem padat karya yang di dalamnya termasuk perbaikan jalan desa maupun fasilitas prasarana (Bappenas, 2021). Pada tahun 1998 total jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi menanggung keterpurukan yaitu sebesar 100.665 orang, keterpurukan ini disebabkan adanya krisis dalam perekonomian yang terjadi di Indonesia, semua sektor ekonomi tidak dapat bergerak, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merajalela hingga berdampak pada sektor kuantitas tenaga kerja industri pengolahan Kabupaten Bekasi saat itu.

Menurut Samuelson, Investasi dapat diartikan seperti pembuangan atau pembelian instansi atas barang modal/aset serta perlengkapan produksi agar menaikkan performa produksi barang dan jasa yang terdapat pada perekonomian (Rezeika Mutia Sari, 2019).

Investasi atau penanaman modal yang dikerjakan adalah penanaman langsung dalam arus Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi langsung tentu diinginkan mendorong pertumbuhan perekonomian dari *output* yang dihasilkan seiring dengan peningkatan investasi daerah (Hidayat, 2011). Berikut grafik di bawah untuk menggambarkan total PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi selama 40 tahun terakhir.

Gambar 3. Grafik Total Investasi Kabupaten Bekasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 1980-2020 (Juta Rupiah).



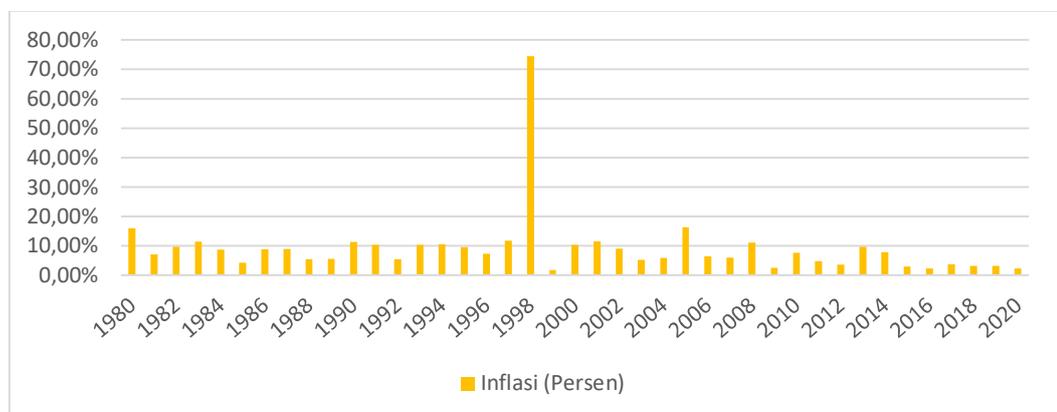
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 1980-2020

Berdasarkan gambar 3 (tiga) di atas dapat dilihat dari 40 tahun terakhir mengenai grafik jumlah investasi PMA dan PMDN yang terlihat oleh sektor

industri pengolahan di Kabupaten Bekasi terus berkembang pertahunnya. Investasi tertinggi terlihat pada tahun 2016 sejumlah 405.536.383 rupiah, hal ini dikarenakan investasi PMA sektor Industri Pengolahan oleh negara Jepang termasuk paling tinggi sebesar 25,34 triliun rupiah. Selanjutnya, setiap tahun negara Jepang selalu menjadi investor tertinggi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dari sisi jumlah usaha atau proyek PMA dan PMDN, hingga tahun 2019 Kabupaten Bekasi memiliki 6.569 titik investasi atau mencapai 32,81% dari semua usaha di Jawa Barat, Diikuti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang (BKPM, 2019). Investasi terendah terlihat pada tahun 1989 sebesar 1.917.645 rupiah, hal ini dikarenakan masih dalam masa Repelita IV (empat) dimana PMDN sektor pertanian mendominasi sebesar 26,3% persen dari seluruh total investasi (Bappenas, 2021). Sementara pada tahun 1998 jumlah investasi sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi mengalami keterpurukan yaitu sebesar 22.094.740,1 rupiah, keterpurukan ini disebabkan adanya krisis dalam perekonomian yang terjadi di Indonesia, semua sektor ekonomi tidak dapat bergerak, dan kepercayaan investor asing maupun dalam negeri berkurang pada sektor industri pengolahan saat itu.

Terdapat dua faktor yang termasuk dalam laba atas investasi. Pertama, faktor melalui kualitas serta reputasi manajemen, bentuk modal, bentuk hutang perusahaan, dan lain-lain. Kedua, terkait faktor luar seperti dampak kebijakan fiskal dan moneter, pengembangan sektor industri, serta kondisi perekonomian seperti inflasi (Gunawan, 2012). Berikut hasil grafik inflasi di bawah.

Gambar 4. Grafik Tingkat Inflasi Kabupaten bekasi, 1980-2020 (Persen).



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 1980-2020

Bersumber pada gambar 4 (empat) di atas bisa diamati bahwa grafik tingkat inflasi kabupaten Bekasi terus ditekan hingga sampai tahun 2016 yaitu senilai 2.37% (persen), hal ini dikarenakan dalam setahun tercatat sebanyak 10 (sepuluh) bulan mengalami inflasi dan 2 bulan mengalami deflasi yaitu di bulan April dan Agustus (BPS, 2017). Inflasi tertinggi pertama berada pada tahun 1998 sebesar 74.42% (persen), kejadian ini disebabkan meningkatnya beban bunga serta utang yang menimbulkan perusahaan-perusahaan kesulitan dalam memperoleh utang luar negeri dalam jumlah yang besar, sehingga laba perusahaan menurun dan berkurangnya modal kerja. Sedangkan tingkat inflasi terbesar kedua tercatat di tahun 2005 sebesar 16,41% (persen), hal ini disebabkan telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat melalui penurunan konsumsi makanan pada tahun 2004 sebesar 53% hingga 47% pada tahun 2005. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat kabupaten Bekasi menurun karena adanya perubahan permintaan dimana kebutuhan non makanan menjadi permintaan utama saat itu (BPS Kabupaten Bekasi, 2006).

Terjadinya inflasi regional akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan produksi dari unit usaha atau perusahaan itu sendiri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi turunnya pendapatan daerah, serta berdampak pada perlambatan kualitas tenaga kerja yang bekerja, perlambatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal daerah dan nasional (Garini, 2018).

Peneliti tertarik pada penelitian ini dikarenakan terdapat pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap sektor industri pengolahan. Penelitian ini diperkuat oleh adanya penelitian dari oleh Setyo Adhi Wibowo dan Nugroho SBM pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Pengolahan Dan Efisiensi Produksi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2015 membuktikan bahwa Modal Produksi dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap *Output* Produksi Industri Pengolahan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ghiyats Maraya Rizki pada tahun 2018 pada judul Perkembangan Industri Pengolahan di Kota Banjarmasin membuktikan bahwa Investasi dan Tenaga Kerja tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri Pengolahan di Kota Banjarmasin. Penelitian lainnya dilakukan oleh Mita Rulinawati pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan

Industri Pengolahan di Indonesia Periode 2005-2016 membuktikan bahwa Inflasi berpengaruh. Penelitian lainnya dilakukan oleh Batari Saraswati Karlita pada tahun 2013 melalui judul Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010 membuktikan bahwa Investasi berpengaruh. Penelitian lainnya dikerjakan oleh Fauzi Hidayat pada tahun 2011 dengan judul Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bekasi dapat membuktikan Investasi dan Tenaga Kerja terdapat pengaruh.

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, peneliti perlu mengadakan pebaruan penelitian yang diharapkan dapat memberi saran, gagasan, atau rekomendasi untuk perkembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bekasi”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020?
- b. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020?
- c. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, berikut tujuan pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi tahun 1980-2020.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, berikut diharapkan manfaat hasil penelitian ini :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berkeinginan penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmiah yang mengkaji PDRB, angkatan kerja, investasi, dan inflasi pada industri pengolahan Kabupaten Bekasi, serta dapat memberi teori bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan riset lebih jauh.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk lebih mengetahui tentang PDRB, tenaga kerja, investasi, dan inflasi, serta dapat meningkatkan tingkat prioritas pengembangan industri pengolahan khususnya yang terkait dengan pemerintah daerah.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sektor industri pengolahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan masukan kepada para pengambil kebijakan sehingga dapat lebih memahami untuk mengatasi masalah tersebut.

- 3) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap pada penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol PDRB industri pengolahan, khususnya melalui Tenaga Kerja, Investasi dan Inflasi. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dan transparan sehingga dapat terjalin tata pemerintahan yang baik.